

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL								
A.	Kawasan Lindung								
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya								
1.1.	Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan pada kawasan hutan lindung	Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara,	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur							
1.2.	Rehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degradasi	Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai,	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan							
1.3.	Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air	1. DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		2. DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS Saparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DAS Tunggu, DAS Tungguwatu, dan DAS Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS Halmahera Utara	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangaji pada WS Halmahera Selatan	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (I.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
2.	Kawasan Perlindungan Setempat								
2.1.	Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak	Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar,	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, KKP, Kemenhut, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	fungsi sempadan pantai	Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur							
2.2.	Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan sungai, mengembangkan	1. Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air, pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai	Sungai Pede pada WS Buru	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.2.)						
2. Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-Seram		Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta					
3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tunggu, Sungai Tungguwatu, dan Sungai Maririmar		Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		pada WS Kepulauan Kei-Aru	Kepulauan Maluku (II.2.)						
		4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatan	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen LH, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
2.3.	Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan sekitar danau atau waduk, mengembangkan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air, pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang	Danau Tolire, Danau Sagea, Danau Paca, Danau Galala, Danau Lima, Danau Rano, Danau Rana, Danau Tihu, dan Waduk Wai Ela	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (II.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk								
3.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya								
3.1.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Taman Nasional								
3.1.1.	Taman Nasional	1. Taman Nasional Manusela	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.5.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Taman Nasional Aketajawe-Lolobata	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.5.2.)						
3.2.	Pengembangan Pengelolaan Suaka Alam Perairan, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam								
3.2.1.	Suaka Alam Perairan	Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.1.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda dan/atau Swasta				
3.2.2.	Suaka Margasatwa	1. Suaka Margasatwa Pulau Kobror	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.2.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		2. Suaka Margasatwa Tanimbar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.2.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. Suaka Margasatwa Pulau Baun	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.2.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
3.2.3.	Cagar Alam	1. Cagar Alam Pulau Larat	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.4.)						
		2. Cagar Alam Pulau Obi	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.12.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. Cagar Alam Pulau Nustaram	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. Cagar Alam Pulau Nuswotar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.2.)	yang sah					
		5. Cagar Alam Masbait	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta		▬		
		6. Cagar Alam Daab	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta		▬		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		7. Cagar Alam Bekau Huhun	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		8. Cagar Alam Tafermaar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		9. Cagar Alam Gunung Sahuwai	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		10. Cagar Alam Tanjung Sial	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		11. Cagar Alam Tobalai	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.11.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		12. Cagar Alam Pulau Seho	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.15.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		13. Cagar Alam Gunung Sibela	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.10.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		14. Cagar Alam Lifamatola	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.13.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				
		15. Cagar Alam Taliabu	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.3.14.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
3.2.4.	Taman Wisata Alam Laut	1. Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.6.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH Kemenparekraf, Pemda dan/atau Swasta		█		
		2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.6.2)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH Kemenparekraf, Pemda dan/atau Swasta		█		
		3. Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.6.3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH Kemenparekraf, Pemda dan/atau Swasta		█		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
3.2.5.	Taman Wisata Perairan	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.6.4.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH Kemenparekraf, Pemda dan/atau Swasta				
3.3.	Pelestarian Kawasan Pantai Berhutan Bakau								
3.3.1.	Pemertahanan dan pemeliharaan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya, pengendalian alih fungsi dan rehabilitasi, pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (III.4.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, KKP, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan	Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula							
3.4.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan								
3.4.1	Pengembangan pengelolaan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula,	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendikbud, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Benteng Torre dan Benteng Tzobe	(III.7.)						
4.	Kawasan Rawan Bencana Alam								
4.1.	Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam, menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur	1. Kawasan rawan tanah longsor di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (IV.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Kemen ESDM, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana	2. Kawasan rawan gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (IV.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		3. Kawasan rawan banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (IV.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, BMKG, Pemda, dan/atau Swasta				
5.	Kawasan Lindung Geologi								
5.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi								
5.1.1.	Rehabilitasi dan pelestarian kawasan karst, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam karst yang dapat merusak keunikan bentang alam karst serta ekosistem yang	Kawasan karst di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus	Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (V.1.1.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemen LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	terdapat di dalamnya, serta pengembangan kawasan karst yang memiliki keunikan bentang alam, budaya, tumbuhan, dan/atau satwa khas yang bernilai ekologi tinggi sebagai objek wisata dan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu proses karstifikasi serta merusak bentuk bentang alam dan fungsi kawasan karst	Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan							
5.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi								
5.2.1.	Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai	1. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, dan	Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LH, BNPB, BMKG, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam geologi, pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami, pengembangan	Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora , Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi	(V.2.1.)						
		2. Kawasan rawan gempa bumi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan	Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (V.2.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, BMKG, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	sistem peringatan dini pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan tsunami serta pengembangan dan rehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan tsunami	Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur							
3. Kawasan rawan gerakan tanah di Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda		Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (V.2.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, BMKG, Pemda, dan/atau Swasta					
4. Kawasan rawan tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram		Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (V.2.4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, BMKG, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							
6.	Kawasan Lindung Lainnya								
6.1.	Pemertahanan dan pemeliharaan terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari, mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak terumbu karang, mengembangkan prasarana penanda pada wilayah	Terumbu karang di Gugus Kepulauan Banda, Pulau Tuture dan Pulau Gurida di Laut Maluku, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Pulau Buru	Lampiran II.A Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (VI.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	perairan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam <i>Coral Triangle</i>								
6.2.	Penetapan kawasan koridor ekosistem, pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi, pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan	1. Kawasan koridor paus di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (VI.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan koridor lumba-lumba di Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			Kepulauan Maluku (VI.2.)						
		3. Kawasan koridor penyu hijau di Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Aru	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (VI.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. Kawasan koridor duyung di Laut Banda	Lampiran II.A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Kepulauan Maluku (VI.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemen LH, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
B.	Kawasan Budi Daya								
1.	Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1.1.	Kawasan peruntukan hutan								
1.1.1.	Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi, mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan, pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan, peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecil, pengendalian kegiatan budi daya	Kawasan peruntukan hutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhut, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung	Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							
1.2.	Kawasan peruntukan pertanian								
1.2.1.	Pengembangan dan rehabilitasi Kawasan Budi Daya perkebunan kelapa, kakao, pala dan cengkeh	1. Kawasan Budi Daya perkebunan kelapa di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Pemda dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							
		2. Kawasan Budi Daya perkebunan kakao di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Pemda dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)						
		3. Kawasan Budi Daya perkebunan pala dan cengkeh di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							
1.2.2.	Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan perkebunan sagu	Kawasan perkebunan sagu di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	untuk mendukung kemandirian pangan	Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan	Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	yang sah					
1.2.3.	Pengembangan Kawasan Budi Daya pertanian tanaman pangan lahan basah, Kawasan Budi Daya pertanian lahan	1. Kawasan Budi Daya pertanian tanaman pangan lahan basah di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	kering dengan komoditas palawija, hortikultura, dan umbi-umbian, serta Kawasan Budi Daya peternakan	Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)						
		2. Kawasan Budi Daya pertanian lahan kering pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kepulauan Sula Bagian Barat							
		3. Kawasan Budi Daya peternakan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.2.4.	Pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung, penetapan dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan peruntukan pertanian di di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, dan/atau Pemda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar							
1.3.	Kawasan Peruntukan Perikanan								
1.3.1.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan	1. kawasan peruntukan perikanan tangkap di wilayah perairan Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. kawasan peruntukan perikanan budi daya di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.3.2.	Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat	Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.3.3.	Peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional	Kawasan Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Sekitarnya, Kawasan Pulau Morotai dan Sekitarnya, dan Kawasan Guraici dan Sekitarnya							
1.3.4.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan Negara	Kawasan peruntukan perikanan di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.3.5.	Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu	Wilayah perairan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	karang dan kawasan Koridor Ekosistem	Bagian Barat, Gugus Pulau Buru, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (3.)						
1.4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan								
1.4.1.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali	Wilayah perairan Laut Halmahera, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Laut Banda, Gugus Kepulauan Babar, dan Laut Arafura	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
1.4.2.	Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan emas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kawasan peruntukan pertambangan emas di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ambon	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dan Pulau-Pulau Lease, dan Gugus Kepulauan Terselatan							
1.4.3.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan nikel dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kawasan peruntukan pertambangan nikel di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
1.4.4.	Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil	Kawasan peruntukan pertambangan mineral di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Kepulauan Sula	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Terselatan							
1.4.5.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan Negara	Kawasan peruntukan pertambangan di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.5.	Kawasan Peruntukan Industri								
1.5.1.	Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal	Kawasan peruntukan industri di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.5.2.	Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral	Kawasan peruntukan industri di Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
1.5.3.	Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan	Kawasan peruntukan industri di Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Kepulauan Tanimbar	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Pemda, dan/atau Swasta				
1.5.4.	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Kemen ESDM, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor	Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)						
1.5.5.	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Kemen ESDM, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.5.6.	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi bencana banjir	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, dan Kabupaten Buru	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Kemen ESDM, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.5.7.	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi bencana gempa bumi	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Maluku Barat Daya	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kementan, Kemen ESDM, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata									
1.6.1.	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari	1. Kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau Kobror, Suaka Margasatwa Tanimbar, Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Taman Nasional Manusela, Taman Wisata Alam	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemenhut, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kawasan Tobelo dan Sekitarnya							
		3. Kawasan wisata bahari di Kawasan Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan Guraici dan Sekitarnya	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
1.6.2.	Pengembangan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya	Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tzobe	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)						
1.6.3.	Pengembangan secara terbatas zona pemanfaatan wisata bahari	Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya, Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, serta Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenparekraf, KKP, Kemenhut, Pemda, dan/atau Swasta				
1.6.4.	Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata	Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya, Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Tidore dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.6.5.	Peningkatan keterkaitan kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional dan/atau antarkawasan pariwisata	1. Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Ambon, serta Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya dan PKN Ambon, PKW Namlea, serta PKW Masohi	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya serta Kawasan Ambon dengan PKN Ambon	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dan Sekitarnya dengan PKW Tual-Langgur dan PKSN Saumlaki	Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)						
		4. Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya dengan PKW Tobelo dan PKSN Daruba	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Kawasan Tobelo dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		PKW Tobelo, dan PKW Tidore							
		6. Kawasan Guraici dan Sekitarnya serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dan PKW Tidore serta PKW Labuha	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
1.7.	Kawasan Peruntukan Permukiman								
1.7.1.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana	1. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dan Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat							
		2. Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah							
		3. Kawasan rawan bencana banjir di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Legatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Kawasan rawan bencana gempa bumi pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur							
		6. Kawasan rawan bencana gerakan tanah pada Gugus Pulau Seram Utara,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda	Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)						
		7. Kawasan rawan bencana tsunami pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat							
1.7.2.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan	Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki,	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, dan Kota Daruba	(7.)						
1.7.3.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air	Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, Kemenristek, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
1.7.4.	Pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, serta Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease	Lampiran II.B Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenpera, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				
2	Kawasan Andalan								
2.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Kehutanan								
2.1.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
			Andalan di Kepulauan Maluku (2.)						
		3. Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
2.1.2.	Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan	1. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, dan Pelabuhan Bula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		2. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana, serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
2.2.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertanian								
2.2.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
2. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar		Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta					
3. Kawasan Andalan Buru		Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta			█	
2.2.2.	Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan	1. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, dan Pelabuhan Bula	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		2. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea serta Pelabuhan Namlea	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. keterkaitan antara Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan dengan PKW Labuha, serta Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
2.3.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perkebunan								
2.3.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		3. Kawasan Andalan Buru	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli- Sofifi-Weda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta			■	
2.3.2.	Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan	1. keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Masohi, PKW Kairatu, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, dan Pelabuhan Bula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		2. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki dan Pelabuhan Dobo	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea serta Pelabuhan Namlea	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore,, PKW Tobelo dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Sofifi, dan Pelabuhan Wayabula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	
		5. keterkaitan antara Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan dengan PKW Labuha, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Mafa, dan Pelabuhan Laiwui	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana, serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementan, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
2.4.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perikanan								
2.4.1.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, dan permukiman serta pengembangan jasa di bidang kelautan	1. Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	dan perikanan	3. Kawasan Andalan Buru	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta			■	
		4. Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta		■		
		5. Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta	■	■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		7. Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		8. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Kepulauan Maluku (9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
2.4.2.	Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara	1. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan/atau Bandar Udara Pattimura	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Pelabuhan Tual, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Batugoyang, dan Bandar Udara Olilit							
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea dan Pelabuhan Namlea	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Bandaneira, dan/atau Bandar Udara Pattimura							
		5. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan PKSN Saumlaki dan PKSN Dobo serta Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Batugoyang dan/atau Bandar Udara Olilit	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		6. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Wayabula, dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah	Kepulauan Maluku (6.)						
		7. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		8. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya dengan	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	KKP, Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dengan PKN Ternate-Sofifi serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah	Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (9.)	yang sah					
2.4.3.	Pemantapan dan pengembangan pelabuhan perikanan untuk melayani kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan/atau internasional	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di Kota Ambon	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. PPN Tual di Kota Tual	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		3. PPN Ternate di Kota Ternate	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
2.4.4.	Pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan berbasis masyarakat	1. Kawasan minapolitan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon pada Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan minapolitan di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Maluku Tenggara pada	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar							
		3. Kawasan minapolitan di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai pada Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda- dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. Kawasan minapolitan di Kabupaten Kepulauan Sula pada Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	KKP, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
2.5.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertambangan								
2.5.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
2. Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya		Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta					
3. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya		Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta			█	
		5. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta		█		
2.5.2.	Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan	1. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Bandaneira	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta			█	

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan	2. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan PKS N Saumlaki dan PKS N Dobo serta Pelabuhan Saumlaki Pelabuhan Dobo, dan Pelabuhan Batugoyang	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, dan Pelabuhan Sofifi	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		4. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tidore serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, dan Pelabuhan Sofifi	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
2.6.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Industri								
2.6.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan,	1. Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	padat modal, padat karya, hemat air, hemat energi, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana		Kepulauan Maluku (2.)						
		2. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)						
		3. Kawasan Andalan Kepulauan Sula	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Pemda, dan/atau Swasta				
2.6.2.	Peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan	1. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar dengan PKW Tual-Langgur, PKSN Dobo,	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara	PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki, serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang dan Bandar Udara Olilit							
		2. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, dan PKW Tobelo, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Tobelo dan Bandar Udara Sultan Babullah	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta		█		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Kepulauan Sula dengan PKW Sanana serta Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
2.7.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata								
2.7.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Seram	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Kemenhut, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Kawasan Andalan Buru	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Kemenhut, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		3. Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Kemenhut, Kemendikbud, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		6. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, KKP, Pemda, dan/atau Swasta				
2.7.2.	Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung	1. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Seram dengan PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama, serta Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen. PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara	Hatu Piru, Pelabuhan Bula, dan/atau Bandar Udara Pattimura							
	2. Keterkaitan antara Kawasan Andalan Buru dengan PKW Namlea serta Pelabuhan Namlea	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta					
	3. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya dengan PKN Ambon dan PKW Masohi serta Pelabuhan Ambon,	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Pelabuhan Bandaneira, dan Bandar Udara Pattimura							
		4. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya dengan PKS N Saumlaki dan PKS N Dobo serta Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, dan Bandar Udara Olilit	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		5. keterkaitan antara Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya dengan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba, serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Wayabula, dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Maluku (6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				
		6. keterkaitan antara Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya	Lampiran II.C Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		dengan PKN Ternate-Sofifi serta Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Sofifi, dan/atau Bandar Udara Sultan Babullah	Andalan di Kepulauan Maluku (9.)						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO